

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran dinas kelautan dan perikanan kabupaten seluma dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan nelayan berdasarkan penerapan undang-undan nomor 7 tahun 2016 perspektif siyasah idariyah peneliti dapat menarik kesimpulan:

1. Implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Seluma belum berjalan optimal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu komunikasi kebijakan yang belum merata hingga tingkat nelayan, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, sikap dan komitmen pelaksana yang masih perlu ditingkatkan, serta struktur birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung efektivitas pelaksanaan program. Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan berdampak pada belum maksimalnya penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi, peningkatan kapasitas aparatur, penataan birokrasi, serta dukungan sumber daya yang memadai agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
2. Dalam perspektif Siyasah Idariyah, peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seluma merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan nelayan.

Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena belum memenuhi prinsip efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola, sinergi antarinstansi, dan peningkatan kualitas pelayanan agar tujuan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dapat tercapai secara adil dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Daerah/Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seluma, perlu memperkuat koordinasi lintas sektor dan komunikasi hingga tingkat desa, meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis, serta menambah alokasi anggaran sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, diperlukan inovasi kebijakan dan penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi serta sektor swasta guna mendukung pemberdayaan nelayan yang berkelanjutan.
2. Untuk Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Masyarakat Nelayan perlu lebih proaktif dalam mendukung kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan, terutama melalui penguatan koordinasi, pengawasan, serta identifikasi permasalahan nelayan di wilayahnya. Pemerintah desa juga diharapkan menyampaikan aspirasi nelayan secara tepat kepada dinas terkait. Bagi masyarakat nelayan, partisipasi aktif dalam sosialisasi, pelatihan, dan program bantuan sangat penting. Nelayan perlu meningkatkan kebersamaan, keterampilan, serta pengelolaan keuangan, termasuk penguatan kelompok nelayan, agar program pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

3. Untuk Akademik

Bagi kalangan akademik dan peneliti, Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti dalam mengembangkan kajian implementasi kebijakan kelautan dan perikanan. Penelitian selanjutnya dapat menyoroti efektivitas pemberdayaan nelayan dari aspek sosial-ekonomi dan partisipatif. Akademisi juga berperan melalui pengabdian masyarakat serta kolaborasi dengan pemerintah guna mendorong inovasi kebijakan berbasis riset.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Al-Fatih, Mushaf. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Al-Hikmah*. (Ponorogo: CV Penerbit Diponorogo. 2010)

BUKU

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978)

Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)

A, Barrientos. *Perlindungan Sosial Untuk Pengurangan Kemiskinan Dan Pembangunan. Dalam: Perlindungan Sosial Dan Pembangunan Ekonomi* (2013)

A. Djazuli, Fiqh Siyasah: *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013)

Abidin Ibnu, *Hasyiyah Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, Juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, tt)

Agustino Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung; Alfabeta, 2008)

Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Dan Van Horn*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)

Leo Agustino. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2016).

Ahmad Rulam, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta Al-Ruzz Media, 2014)

Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006)

Anwar M. Syafi'i, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir: Perspektif Sosial dan Ekonomi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003)

A Wahab Solichin, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991)

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, Juz VIII. (Beirut: Dār Al-Fikr. 2006).

Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses* (Yogyakarta: Capsta Publishing, 2014)

B Ripley, Randal. *Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press*, (Chicago Illionis, 1986)

Edward III, George C. *Implementing Public Policy. Washington*, (D.C.: Congressional Quarterly Press. 1980)

Edward III, George C *Public Policy Implementing, Jai Press Inc*, (London_England. Goggin, Malcolm L Et Al. 1990)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

Djambak Syaipan, *“Metodologi Penelitian”* (Palembang: Universitas Srieijawa, 2008)

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2010).

Fransiskus S. Pasolong, *Teori Administrasi Publik* (Bandung: Alfabeta, 2016)

Hanifah Harsono, *“Implementasi Kebijakan Dan Politik.”* (Jakarta: Grafindo Jaya, 2002)

H. Pasolong. *Kebijakan Publik*. (Bandung Alfabeta, 2016).

- J Widodo, Analisis Kebijakan Publik: *Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. (Malang: Bayumedia Publishing. 2017).
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Rev.Ed.) (Jakarta:Prenada media Group, 2005)
- Moleong Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010)
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014)
- Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: *Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Mulyadi, *"Implementasi Kebijakan"*, (Jakarta: Balai Pustaka. 2015)
- Riant Nugroho. *Public Policy*. (Jakarta: Elex Media Komputindo. (2014).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016)
- Ripley Randal B. *Policy Implementation And Bureaucracy*, (Second Edition, The Dorsey Press, Chicago Illionis, 1986)
- Sabatier Paul, *"Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research"* (Journal of Public Policy 6, 1986)
- Sabatier Paul A dan Mazmanian Daniel A., *Implementation and Public Policy*, (Scott Foresman and Company, USA, 1983)
- Sagala Syaiful, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Alfabeta: Bandung, 2009)
- Setiawan Guntur, *"Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan"*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2004)

- Shihab M. Quraish, *Fiqh Siyasah: Telaah Kritis Tentang Politik dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2007)
- Sjarif Muhammad. S, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 2004)
- Soekanto Soerjono, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta:Pustaka Pelajar, 1992)
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2005)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Sulistiyastuti dan Purwanto, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Bumi Aksara Jakarta, 1991)
- Suyanto Bagong, “*Implementasi Masalah Sosial Anak*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010)
- Supranto. J, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003)
- S Merile Grindle, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo 2002)
- Tachjan. “*Implementasi Kebijakan Publik*”. (Bandung: AIPI. 2006)
- Torang,Syamsir, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Usman Husaini, *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2006)
- Usman Husaini, *Manajemen, Teori, Praktik Dan Riset Pendidikan*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2006)

Wahab Solichin Abdul. *“Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara”*, (Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara, 1997)

Wahab Solichin. Abdul *“Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara”*, (Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara, 1997)

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VIII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989)

Widodo Wahyudi, *Analisis Kebijakan Publik* (Malang: Bayumedia Publishing, 2010)

Winarno Budi, *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses* (Yogyakarta: Capsta Publishing, 2014)

William. N. Dunn, *“Pengantar Analisis Kebijakan Publik.”* (Yogyakarta, Gajah Mada University, 2003)

Zahrah Abu, *Al-Siyasah al-Shar'iyah* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 2001)

Zainal Asikin Dan Amirudin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

JURNAL DAN INTERNET

Al Rafshan Syahputra et, *“Netralitas Lurah Pada Pilkada 2020 Perspektif Siyasah Tanfidziyah”*, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022)

Antonius Haedar dan Tarigan Akib. *“Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya,” Jurnal Baca*, Volume 1, Universitas Pepabari Makassar, 2008

Fahrizal S,
[http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESI S.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESI%20S.pdf), diakses pada tanggal 09 Mei 2025 Pukul 15.10 WIB.

Furqan, perlindungan hukum bagi nelayan aceh timur yang tertangkap diluar zona wilayah aceh Indonesia menurut undang-undang nimir 7 tahun 2016 tentang daya ikan, dan petambak garam. (skripsi ilmu hukum di universitas islam negeri ar-ranirry Darussalam-banda aceh) Herie Saksono, “Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas”, *Jurnal Bina Praja*. Vol 5, Nomor 1, Maret 2013

Haedar Akib dan Tarigan Antonius. “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,” *Jurnal Baca*, Volume 1, Universitas Pepabari Makassar, 2008

<https://sipalap.selumakab.go.id/dokumenpublik/1698137832.pdf>,

Diakses Pada Tanggal 28 Mei 2015 Pukul 11.00 WIB.

Jafar Wahyu Abdul, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist,” *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018

Kamarullah, Muhammad. *Peran Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Dalam Pemberdayaan Nelayan Di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis*. (Skripsi Ilmu Pemerintahan Pekan Baru, 2022)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan (Tahun 2021)

Rahma, Aneka *Analysis of Fiqh Siyasah on a Local Governments Policy About the Making of a Religious and Happy Society in Bengkulu*. (In 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences. 2020)

Saksono Herie “Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas”, *Jurnal Bina Praja*. Vol 5, Nomor 1, Maret 2013

Sari & Putra, R. A, D.M. *Aalisis Penggunaan Data Sekunder Dalam Penelitian Social*. *Jurnal Ilmu Social Dan Humaniora*. 2021

Srimutia, Dhita. *Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (Bpan) Dalam Rangka Meningkatkan Perlindungan Masyarakat Nelayan Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Sibolga*. (Skripsi Ilmu Administrasi Negara Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. 2019)

WAWANCARA

Ajri, Buyung. Nelayan. Wawancara pada tanggal 16 September 2025.

Alif Ma'ruf dan Saari Koto. Bagian Hukum. Wawancara pada tanggal 21 Oktober 2025.

Hendri Wawan. Kepala Desa. Wawancara pada tanggal 16 September 2025.

Mahyudin. Pihak Kecamatan. Wawancara pada tanggal 15 September 2025.

Sadikin, Ali S.TP. Kepala Bidang Perikanan Tangkap. Wawancara pada tanggal 6 Oktober 2025.

Wawancara nelayan, 17 Desember 2024. Desa Gelombang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma

Wawancara Dinas Perikanan Kabupaten Seluma, 23 Desember 2024. Tais, Kabupaten Seluma

Warisa, Pihak Kecamatan Air Periukan, Wawancara pada tanggal 11 november 2025

Imroatul Hidayati, Sekretaris Desa Kungkai, Wawancara Pada Tanggal 10 November 2025

Gusti, Nelayan Daerah Kungkai, Wawancara Pada Tanggal 10 November 2025

Rahmat, Nelayan Daerah Kungkai, Wawancara Pada Tanggal 10 Novemeber 2025

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat (1), *Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (1), *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*

